

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetk. Kedua, Malang :Bayumedia Publishing.
- Algra, dkk, 1983, *Mula Hukum*, Jakarta : Binacipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, tth, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia.
- Bahder Johan Nasution, Cetakan Pertama, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Cetakan Kedua, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, 2008, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Bambang Sugono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet.1, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Desriza Ratman, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Bandung :CV Keni Media.
- Elwi Danil, 2014, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasnya*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Esmi Warassih, 2014, *Monograf Ilmu Hukum*, Endang Sutrisno (Editor), Yogyakarta: Deepublish.

- Hermien Hardiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Masalah Medis*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Hermojo (Penerjemah), dalam Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption*, The Regent of the University of California, Edisi Ketiga, 2005, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch, 2014, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Undang-Undang Tipikor*, Policy Paper.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta :CV.Diadit Media.
- J. Guwandi, 2008, *Hukum dan Dokter*, Jakarta : Sagung Seto.
- Jamaluddin Karim, 2013, *Politik Hukum Legalistik*, Yogyakarta :Imperium.
- Kahar Mansyur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta :Kalam Mulia.
- Mestika Zed, 2007. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta :Prenadamedia Group.
- R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta :Sinar Grafika.
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ronny Hanitijo, 1993. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indo.
- Sabir Alwy, 2006, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 104.
- Salim HS dan Erlies Sptiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Cet.Ketiga, Malang :Bayumedia Publishing.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.

-----, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :Rajawali Pers.

Sumardi Suryabrata, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung : Keni Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2017 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Legalitas Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang sedang dalam Proses Registrasi Ulang.

Surat Keputusan (SK) Kepala BPOM Nomor HK.00.05.3.02706 tentang Promosi Obat.

C. KODE ETIK

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Kode Etik IPMG Tentang Praktik Pemasaran Produk Farmasi Revisi Juli 2013.

D. KAMUS DAN DOKUMEN HUKUM

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Departemen Pendidikan dan Jakarta :Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025

E. WEBSITE

<http://nasional.tempo.co>

<http://www.kpk.go.id>

<https://id.wikipedia.org>.

<http://kbbi.web.id>

<http://definisimu.blogspot.co.id>

<http://donora-forumpharmaceuticalbersih.blogspot.co.id>

<http://sindonews.com>

www.beritasatu.com

www.hukumonline.com

www.pdpersi.co.id

health.kompas.com

<https://beritagar.id>

<http://www.rmol.co>

<http://www.ipmg.online.com>

<http://swa.co.id>

